



**LAPORAN REVIU PENCAPAIAN KINERJA  
BPK PERWAKILAN PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TRIWULAN I TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

### KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta Triwulan I Tahun 2023 telah selesai disusun yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Perwakilan D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai yang terlihat dari total skor kinerja menurut Aplikasi PRISMA pada Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 49,76.

Kedepannya diharapkan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pencapaian IKU Tahun 2023 sehingga target-target kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 April 2023

 Kepala Perwakilan,

  
Widhi Widayat

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	4
1. Sekretariat Perwakilan.....	4
2. Subauditorat BPK.....	6
D. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA.....	12
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta .....	12
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA).....	47
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta .....	47
Strategi: Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, Dan Responsif.....	47
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi .....	48
IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan .....	48
IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan .....	48
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan .....	49
IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.....	49
IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan.....	50
IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal .....	51
IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK .....	51
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP .....	52

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi .....	53
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan .....	54
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .....	56
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi .....	56
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran .....	57
BAB IV PENUTUP .....	58
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta..... 4
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan ..... 7
Gambar 1.3	Data Pegawai Menurut Jabatan PNS..... 8
Gambar 1.4	Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap ..... 9
Gambar 1.5	Data Pegawai Menurut Usia..... 9
Gambar 1.6	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 10
Gambar 2.1	Peta Strategis AKN V..... 12

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Pegawai menurut Jenjang Pangkat dan Golongan..... 7
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Jabatan PNS ..... 8
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap ..... 8
Tabel 1.4	Data Pegawai menurut Usia..... 9
Tabel 1.5	Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai..... 10
Tabel 1.6	Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023..... 11
Tabel 2.1	Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta..... 13
Tabel 2.2	Rencana Aksi 2021 Perwakilan D.I. Yogyakarta ..... 14
Tabel 3.1	Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2023..... 47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II Huruf D tentang Penyampaian Laporan Kinerja yang menyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam,

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya AKN V didukung oleh beberapa satker eselon II. BPK Perwakilan Provinsi D.I (D.I) Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah D.I Yogyakarta, kota/kabupaten di D.I Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Sedangkan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah :

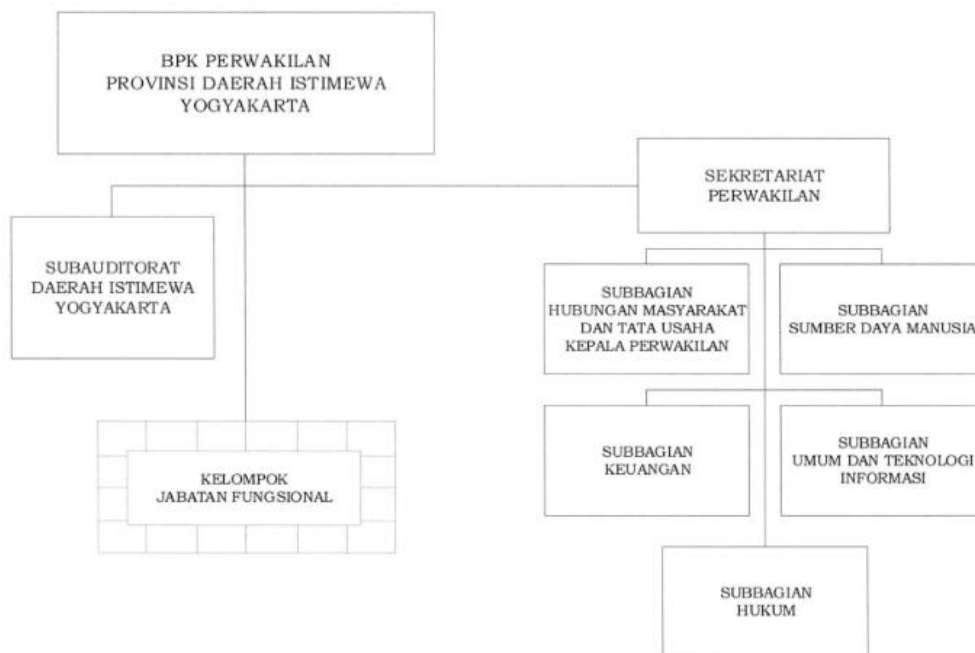
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk



dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta**

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (AKN V) yang terdiri dari :

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat D.I Yogyakarta; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta;
- f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan  
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia  
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.
- c. Subbagian Keuangan  
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

2. Subauditorat D.I Yogyakarta

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta. Selain itu subauditorat mempunyai fungsi tugas pokok diantaranya adalah pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

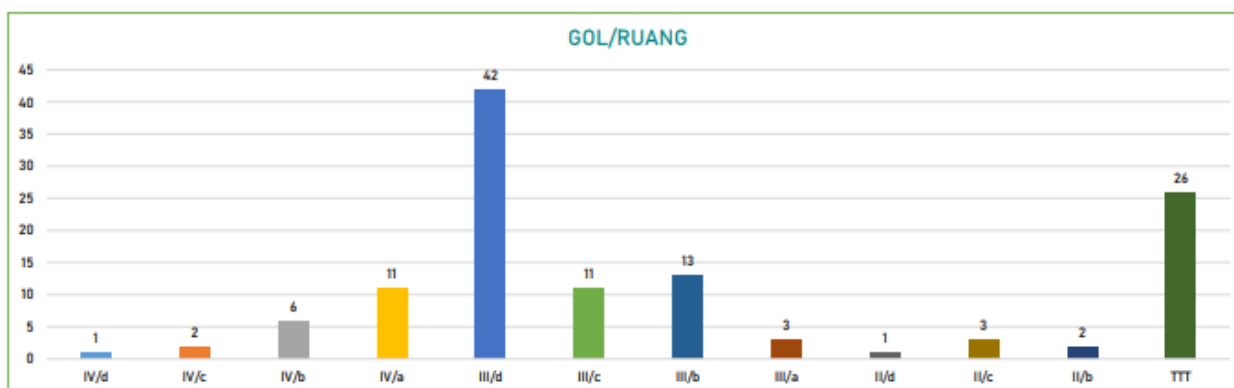
##### 1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan per 31 Maret 2023 memiliki jumlah SDM sebanyak 121 orang yang terdiri dari 94 PNS, 1 CPNS dan 26 Tenaga Tidak Tetap. Data bezetting pegawai di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

**Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV/c	2
3.	Pembina Tingkat I	IV/b	6
4.	Pembina	IV/a	11
5.	Penata Tingkat I	III/d	42
6.	Penata	III/c	11
7.	Penata Muda Tingkat I	III/b	13
8.	Penata Muda	III/a	3
9.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
10.	Pengatur	II/c	3
11.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
12.	TTT		26
Jumlah			121



**Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

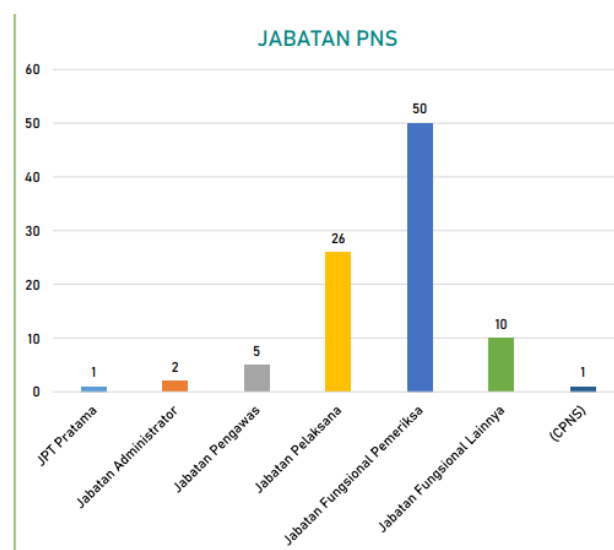
b. Data Pegawai Menurut Jabatan

**Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Jabatan PNS**

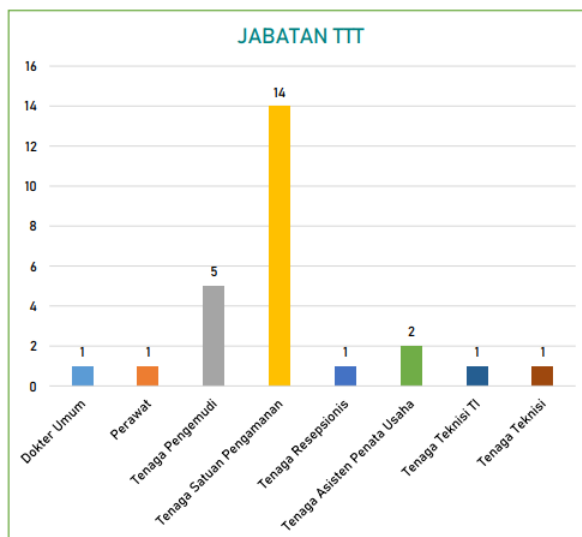
No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	JPT Pratama	1
2	Jabatan Administrator	2
3	Jabatan Pengawas	5
4	Jabatan Pelaksana	26
5	Jabatan Fungsional Pemeriksa	50
6	Jabatan Fungsional Lainnya	10
7	CPNS	1
		95

**Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap**

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Perawat	1
3	Tenaga Pengemudi	5
4	Tenaga Satuan Pengamanan	14
5	Tenaga Resepsionis	1
6	Tenaga Asisten Penata Usaha	2
7	Tenaga Teknisi TI	1
8	Tenaga Teknisis	1
Jumlah		26



**Gambar 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan PNS**

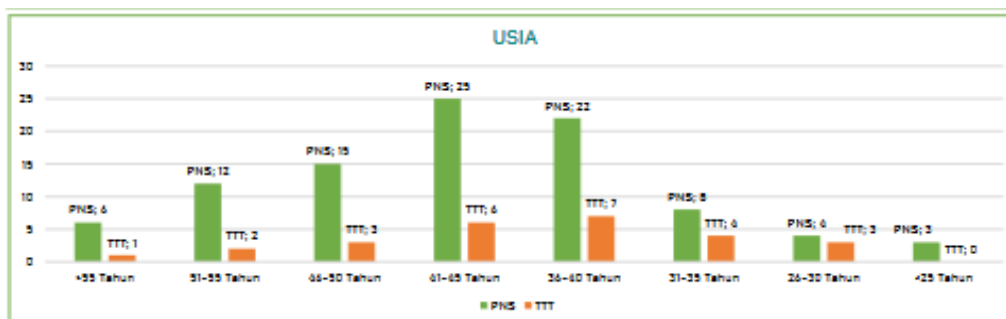


Gambar 1.4 Data Pegawai Menurut Jabatan Tenaga Tidak Tetap

c. Data Pegawai Menurut Usia

Tabel 1.4 Pegawai Menurut Usia

No.	Umur	PNS	TTT	Jumlah
1	> 55 Tahun	6	1	7
2	51 - 55 Tahun	12	2	14
3	46 - 50 Tahun	15	3	18
4	41 - 45 Tahun	25	6	31
5	36 - 40 Tahun	22	7	29
6	31 - 35 Tahun	8	4	12
7	26 - 30 Tahun	4	3	7
8	<25 Tahun	3	0	3
	Total	95	26	121

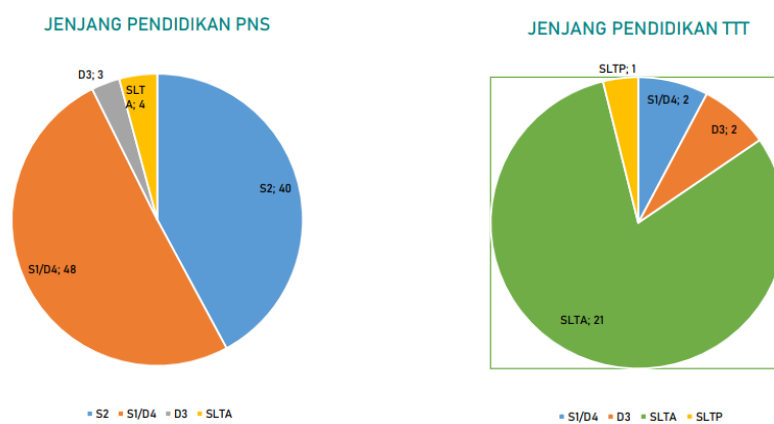


Gambar 1.5 Data Pegawai Menurut Usia

d. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai

**Tabel 1.5 Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai**

No	Pendidikan	PNS	PTT	Jumlah
1	Strata 2	40		40
2	Strata 1	48	2	50
3	D3	3	2	5
3	SLTA	4	21	25
4	SLTP	-	1	1
Total		95	26	121



**Gambar 1.6 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.**



## 2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk Tahun 2023 sebesar Rp16.969.957.000,00, secara rinci dijabarkan pada tabel dibawah ini.

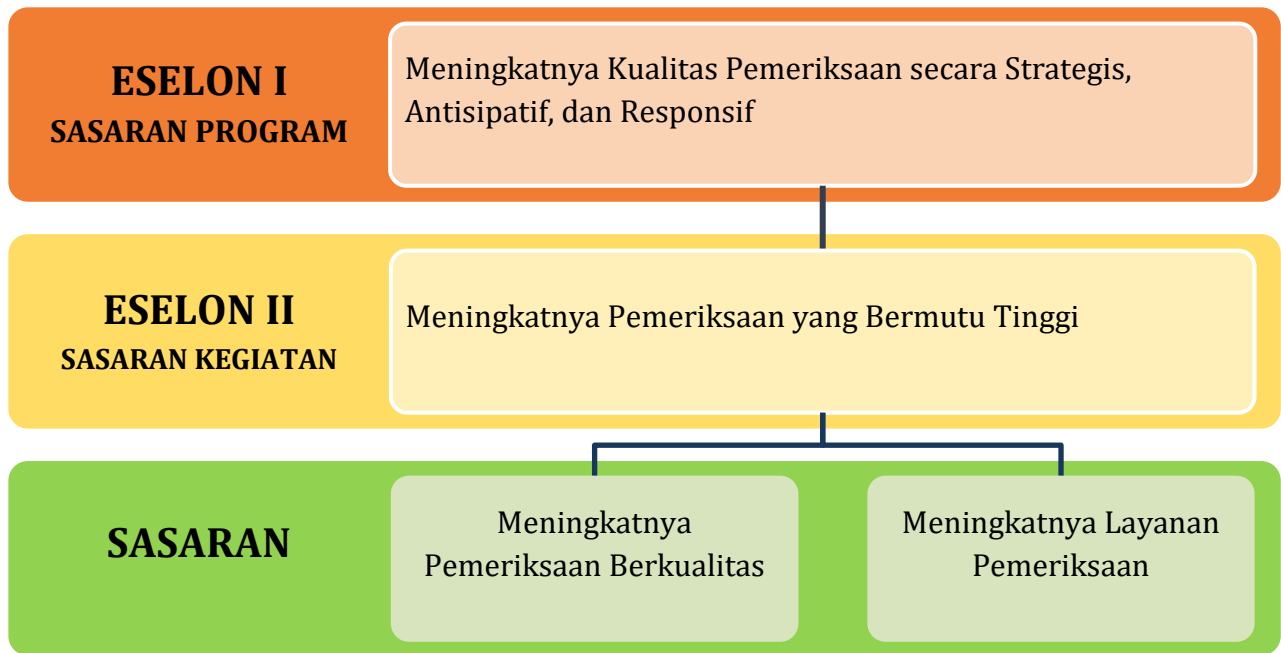
**Tabel 1.6 Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023**

No	Jenis Output	Rencana	
		Vol	Anggaran (Rp)
<b>Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)</b>			
1.	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	51	96.886.000
2.	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	8.768.000
3.	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	25.604.000
4.	Laporan Profil Entitas Perwakilan	6	5.220.000
5.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	12	53.324.000
6.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	12	139.944.000
7.	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	12	90.962.000
8.	LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	10	2.425.607.000
9.	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta	10	1.592.039.000
<b>JUMLAH RKP</b>			<b>4.438.354.000</b>
<b>RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG</b>			
1.	Sarana Bidang Teknologi Infromasi dan Komunikasi	14	231.868.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	10.566.785.000
	Gaji dan Tunjangan		6.328.992.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.237.793.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20	283.660.000
4.	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	1.449.290.000
<b>JUMLAH RKSP</b>			<b>12.531.603.000</b>
<b>JUMLAH RKP DAN RKSP</b>			<b>16.969.957.000</b>

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN**  
**PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

**A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta**

Adapun sasaran strategis oleh AKN V adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 – Peta Strategis AKN V**

**Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta**

Untuk mengukur pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2023:

**Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta**

Sasaran	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</b></li> <li>• <b>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</b></li> </ul>	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%

## B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk Tahun Anggaran 2023, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menetapkan Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan yang diungkap dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Tahun 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Strategi 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>							
<b>Sasaran</b>	<b>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40%	40%	40%	100%	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Tim Reviu Opini;</li> <li>• Melaksanakan diklat teknis persiapan pemeriksaan LKPD;</li> <li>• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP);</li> </ul> <p>Februari</p> <p>Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusimingguan pada pemeriksaan Semester I;</p> <p>Maret</p> <p>Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 atas 3 entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP;</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>April Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2022 atas 3 entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP;</p> <p>Mei Melakukan evaluasi pemeriksaan</p> <p>Juni Melakukan evaluasi pemeriksaan</p> <p>Juli Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</p> <p>Agustus Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</p> <p>September Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Oktober Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p>November Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p>Desember Melaksanakan pemenuhan QA dan QC atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2023 atas 4 entitas dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP.</p>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023</li> <li>• Membentuk Tim Reviu Opini;</li> <li>• Melaksanakan diklat teknis.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Harapan Penugasan							Februari - Maret - April <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2023</li> <li>• Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</li> </ul> Mei - Juni - Juli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi pemeriksaan.</li> <li>• Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</li> </ul> Agustus Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP September Melaksanakan pemeriksaan Kinerja Semester II

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Oktober Melaksanakan pemeriksaan Kinerja Semester II</p> <p>November Melaksanakan pemeriksaan Kinerja Semester II</p> <p>Desember Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Januari Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Februari Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Maret Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>April Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>
								<p>Mei Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>
								<p>Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL per Semester II Tahun 2022;</li> <li>• Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL;</li> <li>• Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).</li> </ul>
								<p>Juli Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Agustus</p> <p>Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>
								<p>September</p> <p>Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>
								<p>Oktober</p> <p>Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>
								<p>November</p> <p>Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berbelut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Desember <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL per Semester I Tahun 2023;</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL;</li> <li>Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	Januari Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;
								Februari Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.
								Maret Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.
								April Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
								Mei -

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juni -</p> <p>Juli Menyusun usulan tim pemeriksaan;</p> <p>Agustus Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan.</p> <p>September Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p>Oktober Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p>November Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci</p> <p>Desember  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan</li> <li>• Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi</li> </ul> </p>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemangku Kepentingan							<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan</li> </ul>
								<p>Februari</p> <p>Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>
								<p>Maret</p> <p>Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>
								<p>April</p> <p>Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>
								<p>Mei</p> <p>Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juni Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Juli Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Agustus Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>September Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Oktober Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>November Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Desember Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Januari Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</p> <p>Februari Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>Maret Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								April Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
								Mei -
								Juni -
								Juli Menyusun usulan tim pemeriksaan;
								Agustus Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan
								September Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci
								Oktober Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci
								November Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Desember • Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan • Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD;</li> <li>• Pengarahan Kepala Perwakilan terkait Integritas, Independen dan Profesionalisme;</li> <li>• Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</li> <li>• Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD</li> </ul> <p>Februari Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja</p> <p>Maret -</p> <p>April -</p> <p>Mei -</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juni Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja;</p> <p>Juli -</p> <p>Agustus -</p> <p>September • Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja; • Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam Surat Tugas;</p> <p>Oktober Mempersiapkan seluruh pegawai dalam mengikuti survei Implementasi Nilai Dasar</p> <p>November -</p> <p>Desember -</p>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)	-	-	-	A (89,00)	Desember	<p>Januari • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Februari Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Maret Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>April  <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I.</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> </ul> </p> <p>Mei Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Juni Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai.</li> </ul>
								<p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> </ul>
								<p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> </ul>
								<p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III tahun 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan II yang belum tercapai.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>November</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</li> <li>• Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai.</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi JASMIN, SISDM, SMP, SIPTL dan SIAP (SIAP LK, SIAP Banparpol);</li> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Mei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
								<p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Desember <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN;</li> <li>• Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.</li> <li>• Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,5%	50%	100%	Desember	Januari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2022 (Penerapan Replikasi BP);</li> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2022);</li> </ul>
								Februari <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisir usulan Best Practice di Perwakilan;</li> </ul>
								Maret <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Bantuan Rekan Sejawat/Peer Assist).</li> </ul>
								April <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan <i>Coaching</i>).</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Mei Inventarisir Replikasi BP untuk diterapkan.
								Juni Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.
								Juli <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.</li> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Habitiasi/Mentoring CPNS);</li> </ul>
								Agustus Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.
								September Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.
								Oktober <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang);</li> <li>• Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								November Penyusunan usulan Best Practise atau replikasi Best Practise.
								Desember Mengusulkan Best Practise atau replikasi Best Practise.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;</li> <li>• Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>• Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> </ul> <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>• Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> <li>• Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan.</li> </ul> <p>Mei</p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Juni Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p>
								<p>Juli Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p>
								<p>Agustus Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p>
								<p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;</li> <li>• Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;</li> <li>• Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;</li> <li>• Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</li> </ul>
								<p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> ;
								November • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> ;
								Desember • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> ; • Evaluasi hasil kuisisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.</li> </ul> <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(8)	(9)
								<p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya;</li> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	88,5%	Desember	<p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023;</li> <li>• Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran;</li> </ul> <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun data capaian output;</li> <li>• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;</li> </ul> <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun data capaian output;</li> <li>• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;</li> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan.</li> </ul> <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;</li> <li>• Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II;</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Mei Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir.</p> <p>Juni Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p> <p>Juli  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</li> <li>• Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun;</li> </ul> </p> <p>Agustus Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.</p> <p>September Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p> <p>Oktober Segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan.</p> <p>November Melakukan revidu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana.</p> <p>Desember Melakukan revidu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana.</p>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)**

**BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

**PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk Triwulan I Tahun 2023:

**Tabel 3.1 Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2023**

Strategi (S)		Target	Realisasi	Skor	Keterangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)		TW I 2023	TW I 2023	TW I 2023	
1	2	4	5	6	8
<b>S</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif</b>				
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40%	40%	100	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0%	0%	0	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	94,83%	105	
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0%	0%	0	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0%	0%	0	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	0	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	-	-	0	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	28%	64,85%	105	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25%	25%	100	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	-	-	0	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	15%	70,21%	105	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	79,61%	89,96	

**STRATEGI: MENINGKATNYA KUALITAS PEMERIKSAAN SECARA STRATEGIS, ANTISIPATIF, DAN RESPONSIF**

**SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA PEMERIKSAAN YANG BERMUTU TINGGI**

**IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Pada Triwulan I Tahun 2023, Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melakukan proses QA dan QC atas 3 LHP LKPD yaitu LHP LKPD Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo dengan target IKU 1 sebesar 40% dan realisasi sebesar 40%. Atas IKU 1, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

**IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 2 sebesar 0% dan belum terdapat penilaian dari EPP sehingga realisasi sebesar 0%. Atas IKU 2, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

### **IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada auditee sejak Tahun 2005.

Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 3 sebesar 75% dengan realisasi sebesar 94,83%.

IKU 3 dapat tercapai dengan cara:

1. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Rekomendasi yang bersifat administrasi dikomunikasikan kepada auditee agar dapat segera ditindaklanjuti.

Atas IKU 3, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

### **IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu Unit Kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang dimasyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 4 sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0% karena pemeriksaan Tematik Nasional direncanakan dilaksanakan pada Semester II.

Atas IKU 4, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

### **IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 5 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Standar penilaian IKU 5 yaitu 100%, bila terdapat permintaan penghitungan kerugian negara dan sebagainya maka nilai dapat bertambah. Pada Triwulan I Tahun 2023 belum ada permintaan dari pemangku kepentingan sehingga atas IKU 5, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.



## **IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 6 sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0% karena pemeriksaan Tematik Lokal direncanakan dilaksanakan pada Semester II.

Atas IKU 6 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

## **IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

4,00 - 5,00 = sangat baik

3,00 - 3,99 = baik

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 7 sebesar 0 dengan realisasi sebesar 0 karena survei tersebut dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

## **IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, and pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

1. Self- assessment oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK
2. Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- AA (>90 – 100) **Sangat Memuaskan**  
Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
- A (>80 – 90) **Memuaskan**  
Terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan tata Kelola berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
- BB (>70 – 80) **Sangat Baik**  
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 satuan kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator.
- B (>60 – 70) **Baik**  
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 satuan kerja, khususnya pada unit kerja utama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon 2.

- CC (>50 – 60) **Cukup (Memadai)**  
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.
- C (>30 – 50) **Kurang**  
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
- D (>0 – 30) **Sangat Kurang**  
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 8 sebesar 0 dan belum terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Itama sehingga realisasi sebesar 0. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

### **IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL).

Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (updating) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reuiu, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 9 sebesar 28% dengan realisasi sebesar 64,85%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

IKU 9 dapat tercapai dengan cara:

1. Seluruh pegawai memanfaatkan layanan aplikasi SISDM untuk memperbarui data masing-masing pegawai;
2. Memanfaatkan layanan aplikasi JASMIN dalam memberikan disposisi;
3. Memanfaatkan layanan aplikasi SMP untuk penginputan data pemeriksaan;
4. Memanfaatkan layanan aplikasi SiAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci;
5. Memanfaatkan layanan aplikasi SiPTL untuk memperhatikan status Tindak Lanjut.

### **IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

*Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

1. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update. Aspek inovasi/kebaruan/update yang dimaksud dapat berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 10 sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

## **IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 11 sebesar 0 dengan realisasi sebesar 0 karena survei tersebut dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0.

## **IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No. 5 Tahun 2014).
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.
4. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satuan Kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja baru.

Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuis dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 12 sebesar 15% dengan realisasi sebesar 70,21%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

### **IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran**

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan
3. Pencapaian output
4. Efisiensi

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2023, target IKU 13 sebesar 88,5% dengan realisasi sebesar 79,61%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 89,96%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini merupakan perwujudan pencapaian kinerja baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai yang terlihat dari total skor kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 49,76.

Penyusunan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.



# LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA  
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA  
TRIWULAN I TAHUN 2023**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
<b>SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA</b>					<b>49,76</b>
<b>SASARAN KEGIATAN</b>					<b>49,76</b>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40,00%	40,00%	100,00	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0,00%	0,00%	0,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	94,83%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0,00%	0,00%	0,00	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0,00%	0,00%	0,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	0,00	0,00	0,00	
8	Hasil Evaluasi AKIP	0,00	0,00	0,00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	28,00%	64,85%	105,00	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25,00%	25,00%	100,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	0,00	0,00	0,00	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	15,00%	70,21%	105,00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,50%	79,61%	89,96	